

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN USAHA PANGKALAN GAS ELPIJI (Studi Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk)

Oleh :

Cica Rahmawati

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana penipuan yang memanfaatkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pendirian usaha pangkalan gas elpiji. Modus penipuan yang kerap digunakan pelaku biasanya berupa janji pengurusan izin pangkalan LPG dengan imbalan sejumlah uang, namun izin tersebut tidak pernah direalisasikan. Kasus dalam Putusan Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tanjung Karang menjadi contoh konkret penyimpangan tersebut, dimana terdakwa Prabu Ricky Perdana menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya analisis yuridis mengenai pemenuhan unsur tindak pidana penipuan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan menelaah data primer berupa putusan pengadilan dan keterangan para pihak yang terlibat dalam proses persidangan, serta data sekunder berupa literatur hukum, doktrin, dan hasil penelitian sebelumnya. Kombinasi metode ini memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan unsur delik penipuan dalam kasus yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP terbukti terpenuhi, baik unsur subjektif berupa niat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum maupun unsur objektif berupa penggunaan tipu muslihat dan kebohongan yang membuat korban menyerahkan uang. Hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa dengan dasar pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan yuridis menekankan pada terpenuhinya alat bukti yang sah, sementara aspek sosiologis melihat dampak kerugian terhadap korban serta keresahan masyarakat. Adapun aspek filosofis menegaskan nilai keadilan dan kepatutan sebagai dasar dalam menyeimbangkan kepentingan hukum.

Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan terhadap proses perizinan usaha pangkalan LPG guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran jasa pengurusan izin usaha yang tidak memiliki dasar hukum atau bukti administrasi yang jelas. Upaya preventif tersebut diharapkan dapat meminimalkan terjadinya tindak pidana penipuan serupa di masa mendatang.

Kata Kunci : Penipuan, Pemenuhan Unsur, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS REGARDING PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACTS OF FRAUD IN THE LPG GAS BASE BUSINESS (Study of Decision Number 851/Pid.B/2024/PN Tjk)

By:

Cica Rahmawati

This research is motivated by the rise in fraudulent acts exploiting the high public demand for LPG gas depots. The fraudulent method often employed by perpetrators is the promise of obtaining an LPG depot permit in exchange for a sum of money, but the permit is never realized. Case No. 851/Pid.B/2024/PN Tanjung Karang is a concrete example of this deviation, where defendant Prabu Ricky Perdana used deception and a series of lies to obtain personal gain. This situation demonstrates the importance of a legal analysis regarding the fulfillment of the elements of the crime of fraud and the judge's considerations in issuing a verdict.

This research uses both normative and empirical legal approaches. The normative approach is conducted through a review of relevant laws and regulations, particularly Article 378 of the Criminal Code concerning fraud. Meanwhile, the empirical approach is conducted by examining primary data in the form of court decisions and statements from parties involved in the trial process, as well as secondary data in the form of legal literature, doctrine, and previous research findings. This combination of methods provides a comprehensive overview of the application of the elements of the crime of fraud in the case studied.

The research results indicate that all elements of the crime of fraud as stipulated in Article 378 of the Criminal Code have been met, both the subjective element of the intention to unlawfully benefit oneself and the objective element of the use of deception and deception to induce the victim to hand over the money. The judge in this case sentenced the defendant to one year and six months based on legal, sociological, and philosophical considerations. The legal considerations emphasize the availability of valid evidence, while the sociological aspect examines the impact of losses on the victim and public unrest. The philosophical aspect emphasizes the values of justice and fairness as the basis for balancing legal interests.

This research recommends that the government strengthen oversight mechanisms for the LPG depot business licensing process to prevent misuse by irresponsible parties. Furthermore, the public is urged to be more cautious about offers of

business permit processing services that lack a clear legal basis or administrative evidence. These preventive measures are expected to minimize similar fraudulent acts in the future.

Keywords: Fraud, Fulfillment of Elements, Judge's Consideration.